



**PANCASILA
SEBAGAI REALITAS**

**PERCIK PEMIKIRAN TENTANG
PANCASILA & ISU-ISU KONTEMPORER
DI INDONESIA**

AL KHANIF (Ed)



**PANCASILA
SEBAGAI REALITAS
PERCIK PEMIKIRAN TENTANG
PANCASILA & ISU-ISU KONTEMPORE
DI INDONESIA**

AL KHANIF (Ed)

PANCASILA SEBAGAI REALITAS

**PERCIK PEMIKIRAN TENTANG
PANCASILA & ISU-ISU KONTEMPORER
DI INDONESIA**



PANCASILA SEBAGAI REALITAS

PERCIK PEMIKIRAN TENTANG
PANCASILA & ISU-ISU KONTEMPORER
DI INDONESIA

AL KHANIF (Ed)



**PANCASILA
SEBAGAI REALITAS**

Percik Pemikiran tentang
Pancasila dan Isu-Isu
Kontemporer di Indonesia

Cetakan Pertama • Agustus 2016

Editor • Al Khanif

Perwajahan Buku • Jendro Yuniarto

Sampul Depan • 74CK

Pracerak • 74CK

Diterbitkan oleh

PUSTAKA PELAJAR

Celeban Timur UH III/548 Yogyakarta 55167

Telp. (0274) 381542 Faks. (0274) 383083

E-mail: pustakapelajar@yahoo.com

Website: pustakapelajar.co.id

ISBN: 978-602-229-651-5

Pengantar Editor

SELESAINYA buku kompilasi tentang Pancasila yang berjudul "*Pancasila Sebagai Realitas: Percik Pemikiran Tentang Pancasila dan Isu-Isu Kontemporer di Indonesia*" ini merupakan sebuah prestasi yang layak untuk diapresiasi. Hal ini dikarenakan mencari penulis yang fokus pada kajian Pancasila tidak lah mudah dalam waktu yang singkat. Sejak pertengahan Mei 2016 sampai tanggal 1 Juni 2016 hanya ada dua tulisan yang masuk ke meja editor. Lalu kami putuskan untuk memperpanjang masa penulisannya sampai medio Juni. Lalu, mulailah berdatangan beberapa tulisan meskipun dengan kualitas yang beragam. Inilah tantangan terbesar yang dihadapi oleh editor. Tantangan yang tidak kalah berat adalah adanya beragam latar belakang keilmuan para penulis karena editor dituntut untuk bisa memilah dan memilih tulisan yang masuk dan membuat kluster tulisan berdasarkan sub tema yang mereka ajukan. Kendala non teknis juga tidak kalah menantang. Kurang dari seminggu dari tenggat penyerahan naskah ke penerbit, editor belum mendapatkan dana dari Universitas Jember selaku penyokong dana penerbitan buku kopilasi ini karena permasalahan administrasi. Namun pada akhirnya semua tantangan

selama beberapa minggu terakhir sebelum tenggat penyusunan naskah ke Pustaka Pelajar.

Secara garis besar, buku kompilasi tentang Pancasila sedikit berbeda dengan edisi Pancasila tahun sebelumnya yang juga didanai oleh Universitas Jember. Jika edisi sebelumnya tema besarnya sudah ditentukan oleh editor, edisi kali ini justru membebaskan para kontributor untuk menulis tentang Pancasila berdasarkan latar belakang kompetensi mereka masing-masing. Hal ini dimaksudkan agar editor bisa mendapatkan tulisan yang banyak dalam waktu yang tidak terlalu lama. Selain itu, keputusan untuk tidak membuat tema dimaksudkan agar Pancasila bisa ditafsirkan, dianalisis dan dijabarkan oleh para penulis sehingga nantinya ruh Pancasila tidak berada dalam tataran idealis editor melainkan berada dalam alam pemikiran para penulis. Inilah yang menjadi dasar pemilihan judul buku "Pancasila Sebagai Realitas". Kami ingin memberikan perspektif baru bagi para pembaca bahwa Pancasila tidak harus dimonopoli oleh pemegang kekuasaan, bukan saja kekuasaan negara seperti di Era Orde Lama dan Orde Baru melainkan oleh seorang editor buku sebagai pemegang mutlak untuk meloloskan maupun menolak tulisan yang dianggap sesuai atau tidak sesuai dengan tema yang telah ditentukan.

Ternyata, keputusan untuk tidak menentukan tema besar buku Pancasila ini telah melahirkan beragam perspektif tentang Pancasila seperti yang ada dalam buku ini. Lalu editor mulai mengelompokkan beberapa tulisan ke dalam kluster-kluster tema Pancasila. Lalu muncullah enam kluster yang dimulai

dari kluster Pancasila dalam realitas hukum hingga Pancasila dan isu-isu kesehatan di Indonesia.

Kenapa editor memilih Pancasila sebagai kluster pertama? Dasar pemikirannya adalah karena buku ini ingin meneguhkan Pancasila sebagai norma dasar dalam berbangsa dan bernegara oleh seluruh elemen bangsa. Editor memilih tulisan dari Gautama Budi Arundhati dan Dominikus Rato yang secara substansial mengajukan proposisi kaitan antara norma Pancasila dan proklamasi. Keduanya menyoroti posisi Pancasila secara berbeda. Gautama mengajukan ide untuk mengaitkan Pancasila dan proklamasi dimana Pancasila seharusnya sudah mengikat seluruh elemen bangsa Indonesia sejak proklamasi. Di lain pihak, Rato justru berpendapat bahwa proklamasi harus dimasukkan sebagai salah satu pilar kebangsaan bersama dengan konstitusi, persatuan Indonesia dan pluralisme sedangkan Pancasila berposisi diatas empat pilar tersebut. Kluster tentang Pancasila dalam realitas hukum ini diakhiri oleh tulisan Siti Muniroh yang menelaah Pancasila dari perspektif etika. Tulisan etika ini menjadi penting untuk menjadi dasar dari pemikiran-pemikiran lain karena meletakkan Pancasila sebagai landasan etika dalam berbangsa dan bernegara. Meskipun Muniroh tidak mempertanyakan tentang bagaimana norma-norma Pancasila yang sangat umum dan sangat sederhana itu bisa dipahami oleh seluruh warga negara Indonesia, setidaknya proposisinya berusaha mematahkan persepsi negatif sebagian kalangan yang meragukan Pancasila sebagai sebuah ideologi negara.

Kluster kedua adalah tentang Pancasila dalam realitas

Digital Repository Universitas Jember
Indonesia tidak
dilepaskan dari persoalan relativisme dan universalisme (H
Dinamika ini bisa dilihat dari perspektif yang diajukan oleh
Umar Sholahudin, Muktiono dan Dian Noeswantari. Shola
hudin misalnya mengajukan argumentasi bahwa norma-norma
HAM pada dasarnya sudah termaktub dalam Pancasila dan
sudah seharusnya masyarakat Indonesia melihat Pancasila
untuk merespon isu-isu HAM di Indonesia. Pendapat ini
menunjukkan rasa optimisme dari penulis bahwa Pancasila,
jika dipahami secara benar, bisa menjawab persoalan-persoal-
an kemanusiaan yang terjadi di Indonesia. Meskipun hingga
saat ini harapan tersebut masih jauh dari kenyataan karena
masih sering terjadinya pelanggaran HAM di Indonesia, tidak
salah kiranya Sholahudin mengajak kepada pembaca untuk
lebih optimis dalam memaknai Pancasila.

Sedikit berbeda dengan Sholahudin, Muktiono meng-
ajukan proposisi dengan mengatakan bahwa Pancasila harus
bisa bersandingan dengan dinamika HAM yang terus berkem-
bang di dunia global. Hal ini didasarkan pada semangat para
pendiri bangsa ketika menetapkan Pancasila sebagai ideologi
yang tidak merepresentasikan norma-norma dari suatu keya-
kinan, agama maupun moralitas tertentu. Oleh karena itu
Muktiono mengkritik cara-cara yang dilakukan oleh Orde Baru
ketika rejim tersebut menempatkan Pancasila sebagai ideologi
yang “disaktikan” dengan kekuatan senjata dan monopoli
penafsiran. Pendapat ini ditegaskan oleh Manunggal Kusuma
Wardaya yang menegaskan norma-norma Pancasila, terutama

norma keagamaan, dengan norma-norma HAM internasional. Menurutnya, jika ada penafsiran dari masyarakat tentang Pancasila yang bertentangan dengan norma HAM Internasional, maka sudah seharusnya direvisi dan diperbaiki karena Indonesia telah memutuskan meratifikasi instrumen-instrumen HAM internasional.

Perdebatan mengenai penafsiran ini terus berlanjut di khazanah ketiga tentang Pancasila dalam realitas keagamaan. Al Khanif misalnya mengajukan pendapat bahwa Pancasila tidak bisa diagamakan apalagi disaktikan dengan kekuasaan dan begitu juga sebaliknya agama juga tidak akan menggantikan Pancasila. Keduanya saling melengkapi dan tidak harus dipertentangkan seperti yang akhir-akhir ini sering terjadi di masyarakat. Pancasila sebagai realitas harus dimaknai sebagai sebuah ideologi yang memberikan dasar pengetahuan kepada masyarakat Indonesia yang agamis. Mereka harus memperhatikan etika dan moralitas yang terkandung dalam Pancasila untuk berbangsa dan bernegara terutama dalam merespon perbedaan agama dan keyakinan di masyarakat. Pendapat ini ditegaskan oleh Murni Hermawati Sitanggang. Dia secara cerdas mengatakan bahwa norma-norma dalam Pancasila harus dimaknai oleh semua elemen bangsa untuk menjaga pluralisme yang menjadi salah satu ruh terbentuknya negara Indonesia. Penafsiran yang inklusif seperti ini menjadi penting karena Indonesia mengalami fluktuasi konflik berbasis agama yang masih terus berlangsung. Salah satu sebabnya adalah karena beberapa kelompok masyarakat tidak mengakui Pancasila atau menafsirkan Pancasila sesuai dengan selera mereka.

... karena salah satunya disebabkan adanya Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 tentang Penodaan Agama yang dirumuskan oleh Triana Ochowiwutun. Meskipun peraturan tersebut jelas-jelas membatasi penafsiran agama yang dianggap menyimpang untuk melindungi hak beragama kelompok tertentu dan untuk melindungi agama, namun harus diingat bahwa Indonesia berdasarkan Pancasila tidak mengenal agama yang sama untuk berkembang. Tidak boleh ada monopoli keyakinan oleh suatu kelompok terhadap kelompok lainnya. Tentu saja tulisan Ochowiwutun ini sangat berguna untuk melihat persoalan yang melekat dalam UU Penodaan Agama tersebut.

Pancasila juga terkait dengan isu-isu sosial seperti rasisme dan makar yang masih terjadi di beberapa daerah seperti yang dibahas oleh Khoirul Anam. Dia misalnya mengatakan perlunya pemahaman tentang Pancasila yang inklusif sehingga suatu kelompok masyarakat tidak akan menentang Pancasila vis a vis agama yang mereka anut. Pendapat ini dikuatkan lagi oleh Agustina Dewi Setyari yang membahas tentang monotheisme Pancasila. Arti dari terminologi ini adalah konsep Ketuhanan dalam Pancasila harus inklusif dan sosiologis karena "Ketuhanan Yang Maha Esa" tidak merepresentasikan keyakinan dari suatu agama tertentu sehingga semua jenis monopoli penafsiran keagamaan dalam Pancasila tidak dibenarkan. Persoalan-persoalan sosial terkait dengan pembangunan manusia juga dijelaskan oleh Dian Noeswantari. Dia mencermati beberapa kebijakan pemerintah kaitannya

dengan norma Pancasila khususnya pembangunan manusia yang beradab sebagai bagian dari kewajiban negara dalam memenuhi hak-hak warga negara.

Demokrasi menjadi pilihan kluster berikutnya karena menurut editor, Pancasila juga mengandung norma-norma tentang demokrasi yang dimuat dalam sila keempat. Pendapat yang pertama diajukan oleh Mirza Satria Buana yang menepohkan demokrasi Pancasila dari sisi politik dan hukum. Menurutnya, pada dasarnya Indonesia sudah melaksanakan substansi demokrasi Pancasila seperti yang tercermin dalam demokrasi deliberatif dimana masyarakat terlibat aktif dalam proses demokrasi di Indonesia. Pendapat yang sedikit berbeda diajukan oleh Azkiyak yang menyoroti manipulasi Pancasila oleh sebagian elemen masyarakat. Menurutnya Pancasila telah gagal atau lebih tepatnya “digagalkan” untuk bisa menjawab persoalan kebangsaan. Pasca Orde Baru, Pancasila masih belum mampu untuk mengambil hati masyarakat Indonesia sehingga menurutnya perilaku masyarakat sudah tidak Pancasila. Oleh karena itu Azkiyak mengajukan proposisi untuk merevitalisasi Pancasila dengan cara menafsirkan Pancasila secara mendalam. Pendapat yang sama juga diajukan oleh Rosita Indrayati yang berusaha menganalisis Pancasila dan dinamika demokrasi di Indonesia pasca amandemen Konstitusi. Menurutnya norma-norma Pancasila harus dijadikan pedoman dalam berdemokrasi di Indonesia karena tujuan akhir dari demokrasi Pancasila adalah tercapainya kemakmuran bangsa.

Buku ini juga secara khusus mengangkat isu-isu tentang kesehatan dan moralitas generasi muda Indonesia. Persoalan-

persoalan tersebut dijabarkan dengan baik oleh Irma Prasetyowati, Khoiron dan Dewi Rokhmah. Kedua nama tersebut menyoroti kesehatan masyarakat dari perspektif hukum dan isu-isu lingkungan sedangkan nama terakhir mengkaji persoalan moralitas generasi bangsa terkait perilaku seksual. Menurutnya perilaku yang "liar" dari generasi muda diakibatkan oleh hilangnya norma-norma Pancasila dalam kehidupan masyarakat. Kondisi demikian akan bisa mengancam keberlangsungan bangsa karena generasi muda yang bermoral adalah investasi masa depan yang harus dijaga oleh semua elemen bangsa. Tentu persoalan ini juga terkait dengan isu-isu lingkungan dan kesehatan seperti yang diajukan oleh Khoiron dan Prasetyowati.

Tentu pembahasan-pembahasan tadi masih sangat sedikit dan kurang dalam memotret Pancasila karena Pancasila merupakan sebuah periuk besar yang harus dipahami secara mendalam. Namun setidaknya, percik-percik pemikiran dari para penulis tadi diharapkan mampu memberikan pengetahuan yang benar tentang Pancasila dan akan berguna bagi masyarakat.

Terakhir, saya sebagai editor ingin berterima kasih kepada Rektor Universitas Jember yang telah berkenan menunjuk saya dan mendanai seluruh keperluan dari penerbitan buku ini. Selain itu, rasa terima kasih dan syukur saya juga harus saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Tanpa campur tangannya, sangat mungkin saya akan mengalami kesulitan yang tidak mampu saya atasi dalam menyelesaikan proyek penting ini. Ucapan terima kasih juga harus saya sampaikan

kepada semua penulis dan pihak-pihak yang telah membantu penyelesaian buku ini. Semoga karya ini bisa memberikan manfaat bagi semua manusia, amien.

Jember, 27 Juli 2016

Al Khanif



DAFTAR ISI

PENGANTAR EDITOR — v

DAFTAR ISI — xv

DAFTAR KONTRIBUTOR — xviii

BAB 1

PANCASILA DALAM REALITAS HUKUM INDONESIA — 1

Relasi Norma Proklamasi dan Pancasila — 3

Gautama Budi Arundhati

Korelasi Pancasila, Proklamasi, dan
Pembukaan Konstitusi — 25

Dominikus Rato

Pancasila Sebagai Prinsip Moral Dasar — 50

Siti Muniroh

BAB 2

PANCASILA DALAM REALITAS HAK ASASI MANUSIA — 71

Pancasila dalam Partikularitas Keragaman Bangsa dan
Kosmopolitanitas Dunia — 73

Muktiono

Kemanusiaan yang Adil dan Beradab &
Hak Asasi Manusia — 275

Dian Naeswuntari

BAB 5

**PANCASILA DALAM REALITAS DEMOKRASI IN-
DONESIA — 289**

Mengembalikan Marwah Pancasila dalam Transisi
Demokrasi Indonesia — 291

Mirza Satria Buana

Gerakan Sosial Pancasila: Mewujudkan Bangsa yang
Berkeadilan Sosial — 319

Adzkiyak

Menempatkan Pancasila Sebagai Landasan Demokrasi Pasca
Amandemen Konstitusi — 338

Rosita Indrayati

BAB 6

**PANCASILA DAN HAK ATAS KESEHATAN
DI INDONESIA — 367**

Pancasila Dalam Perspektif Kesehatan Lingkungan — 369

Khoiron

Pancasila Dan Isu Kesehatan — 389

Irma Prasetyowati

Pancasila, Kekerasan dan Ancaman terhadap
Generasi Bangsa — 412

Dewi Rokhmah

Ketuhanan Yang Maha Esa di antara Persatuan Indonesia dalam Kacamata Budaya

Agustina Dewi S.

Pendahuluan

Budaya merupakan bagian yang tidak terlepas dari manusia sehingga ada istilah bahwa manusia merupakan makhluk hidup yang berbudaya. Menurut Koentjaraningrat (2000:181)¹ kebudayaan dengan kata dasar budaya berasal dari bahasa Sanskerta *buddayah*, yaitu bentuk jamak dari *buddhi* yang berarti 'budi' atau 'akal'. Jadi Koentjaraningrat, mendefinisikan budaya sebagai "daya budi" yang berupa cipta, karsa dan rasa, sedangkan kebudayaan adalah hasil dari cipta, karsa dan rasa itu.

Koentjaraningrat juga mengemukakan bahwa ada tujuh unsur yang ada dalam kebudayaan yaitu bahasa, kesenian, sistem religi, sistem teknologi, sistem mata pencaharian, organisasi sosial, dan sistem ilmu pengetahuan (Koentjaraningrat,

¹ Koentjaraningrat. *Pembudayaan dan Kebudayaan*. Jakarta, Rineka Jaya Offset, 2000.

(1979: 203-204)². Ketujuh unsur kebudayaan ini disebut Koentjaraningrat sebagai unsur kebudayaan universal karena selalu ada pada setiap masyarakat. Koentjaraningrat menjelaskan bahwa ketujuh unsur tersebut sudah pasti menjelma dalam tiga wujud kebudayaan. Tiga wujud kebudayaan tersebut menurut Koentjaraningrat (1979:186-187) meliputi (1) wujud kebudayaan sebagai ide, gagasan, nilai, atau norma, (2) wujud kebudayaan sebagai aktifitas atau pola tindakan manusia dalam masyarakat, (3) wujud kebudayaan sebagai benda-benda hasil karya manusia. Sebagai contoh Koentjaraningrat menjelaskan bahwa sistem religi dapat dibagi menjadi tiga wujud kebudayaan. Dalam wujud kebudayaan yang pertama atau ide atau gagasan, sistem religi memiliki gagasan tentang Tuhan, dewa-dewi, roh-roh halus, surga dan neraka, reinkarnasi, dan sebagainya. Lalu sebagai wujud kebudayaan yang kedua atau sistem sosial, sistem religi juga mempunyai pola-pola aktifitas atau tindakan seperti upacara atau ritual baik yang diadakan musiman atau setiap hari. Kemudian sistem religi juga mempunyai benda-benda yang dianggap suci, sakral, atau religius sebagai bentuk wujud kebudayaan ketiga yaitu kebudayaan fisik atau artefak.

Apa yang dipaparkan Koentjaraningrat tentang budaya tersebut telah diakumulasi oleh nilai-nilai yang ada dalam Pancasila. Nilai-nilai yang ada dalam Pancasila juga merupakan bagian dari unsur dan wujud kebudayaan. Berdasarkan paparan dari Koentjaraningrat terdapat salah satu unsur

budaya yang disebut dengan sistem religi. Sistem religi merupakan bagian dari budaya. Sistem religi oleh masyarakat seringkali diwujudkan dalam bentuk agama. Agama menjadi satu hal yang sangat penting bagi masyarakat. Pentingnya agama bagi masyarakat itulah yang pada akhirnya membentuk pola budaya dalam masyarakat dengan dasar identitas agama. Pentingnya agama tersebut dapat dilihat dari munculnya istilah *agama adalah candu*. Mengapa disebut sebagai candu? Disebut sebagai candu karena dengan mengatasnamakan agama seringkali membuat pengikut suatu agama menjadi *taklid* (taat tanpa ilmu). Permasalahan terkait dengan sistem religi tentu lebih kompleks karena Indonesia yang memiliki keberagaman agama. Hal ini dapat dilihat dari merebaknya fenomena kekerasan atas nama agama saat ini.

Pembahasan

Rakyat Indonesia saat ini mulai kehilangan nilai-nilai Pancasila. Nilai-nilai luhur yang selama tujuh puluh satu tahun telah menyatu dengan kehidupan rakyat Indonesia. Selama masa Orde Baru seluruh rakyat Indonesia dipaksa untuk belajar tentang Pancasila melalui P4 (Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila) atau dikenal dengan Eka Prasetya Pancakarsa. Sangat disayangkan pada dekade akhir Orde Baru, P4 lebih banyak berlaku sebagai proyek pemerintahan Era Orde Baru dan sekedar formalitas sehingga tidak tampak hasil nyata. Setelah Orde Baru berakhir maka berakhir pula riwayat P4 atau Eka Prasetya Pancakarsa yang berupaya untuk menanamkan nilai-

nilai Pancasila dengan berbasis budaya atau kearifan lokal rakyat Indonesia tersebut. Kondisi tersebut terus membuat Pancasila makin terpuruk. Terpuruknya Pancasila membuat budaya lokal Indonesia mengalami pergeseran dan berganti dengan budaya kapitalisme global. Selain itu, beberapa saat yang lalu di media dijumpai beberapa informan yang tidak hafal dengan bunyi lima sila dalam Pancasila. Memang, esensinya bukan pada bunyi Pancasila tetapi lebih pada bagaimana kita memahami dan mengamalkan nilai-nilai dari Pancasila tersebut.

Pancasila

Pancasila memiliki lima sila yang begitu sempurna. Dapat dikatakan sempurna karena sesungguhnya semua suku dan agama yang ada di Indonesia mengajarkan lima sila yang ada dalam Pancasila tersebut. Nilai-nilai dalam Pancasila tersebut berakar pada budaya Indonesia. Nilai-nilai dalam Pancasila tersebut merupakan kristalisasi nilai-nilai agama, kepercayaan, dan kearifan lokal rakyat Indonesia. Nilai-nilai Pancasila yang berasal dari keberagaman budaya Indonesia tersebut tetap harus dalam kerangka Persatuan Indonesia. Hal ini yang nampaknya mulai dilupakan oleh berbagai pihak yang ada di negeri ini.

Ketuhanan Yang Maha Esa dan Persatuan Indonesia

Indonesia adalah negara kepulauan dengan jajaran pulau-

Digital Repository of Universitas Sembel
pulaunya yang berjumlah lebih dari 17.560 pulau. Para pendiri bangsa bersusah payah berusaha menyatukan kepulauan-kepulauan itu. Bukan pekerjaan mudah tapi mereka berhasil menyatukannya, sementara kita begitu berat dalam mempertahankannya. Dalam nilai-nilai Pancasila, Persatuan Indonesia juga sarat dengan nilai-nilai Ketuhanan. Hal ini nampak dari ajaran semua agama yang selalu mengajarkan agar menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa merupakan salah satu bentuk ibadah yang dituntunkan oleh semua agama yang ada di Indonesia. Hal inilah yang membuat Ketuhanan diletakkan sebagai sila pertama dan sebagai pondasi dari Pancasila.

Ketuhanan Yang Maha Esa oleh para pendiri bangsa diletakkan pada sila pertama dari Pancasila bukannya tanpa alasan. Ketuhanan Yang Maha Esa sesungguhnya tidak semata-mata merupakan pencerminan dari agama tetapi lebih dalam dari agama, yaitu suatu religiusitas. Nilai-nilai religi ini mutlak ada dalam semua agama. Dengan nilai-nilai religi yang ditanamkan melalui wadah dan media agama diharapkan semua manusia Indonesia bisa paham bahwa semua tindak tanduk, perilaku, tindak tutur, dan pikirannya selalu dilihat oleh Tuhan Yang Maha Esa. Saat manusia yakin bahwa semua tindak tanduknya dilihat oleh Tuhan Yang Maha Esa maka setiap manusia akan sangat berhati-hati dalam berperilaku yang baik maupun yang buruk. Namun, saat ini perkembangannya sangat memprihatinkan. Begitu banyak umat beragama justru berperilaku seperti orang yang seolah-olah tidak beragama, jauh dari nilai-nilai religius.

Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa ini berikutnya dijawantahkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang berupa Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kedua sampai sila kelima dari Pancasila itu harus selalu mengandung nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa. Kemanusiaan yang Adil dan Beradab akan selalu sarat dengan nilai-nilai Ketuhanan. Hal ini nampak bahwa kita dalam menolong manusia tidak semata-mata karena agama yang sama tetapi karena sama-sama makhluk Tuhan yang memang harus saling membantu. Persatuan Indonesia juga sarat dengan nilai-nilai Ketuhanan. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan juga harus mengandung nilai-nilai ketuhanan, bahwa Tuhan selalu mengutamakan nilai-nilai demokratis. Hal ini nampak dari keputusan-keputusan Tuhan yang tidak selalu bersifat mutlak. Tuhan memberikan keleluasaan pada manusia untuk berusaha demi mengubah nasibnya. Hal ini nampak dari firman Tuhan dalam salah satu kitabnya yang mengatakan bahwa Tuhan tidak akan mengubah nasib suatu kaum selama kaumnya tidak mau berusaha. Adapun Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia juga harus mengandung nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam keadilan sosial setiap manusia diwajibkan bisa bersikap adil secara sosial pada manusia lain bukan semata-mata karena agama dan suku yang sama tetapi karena merupakan sesama makhluk Tuhan. Demikian juga dengan para penganan amanah di republik ini. Mereka

...berbeda... kewajiban yang diembannya untuk...
...menjalankan... kewajiban yang diembannya untuk...
...hak yang harus diberikan pada rakyat, bukan se-
...karena mereka adalah para konstituennya.

Faktor Penyebab Degradasi Nilai Persatuan Atas Nama Ketuhanan

Bila kita cermati pemberitaan di media akhir-akhir ini, begitu banyak dijumpai kekerasan dengan mengatasnamakan agama. Ketegaman agama yang ada di Indonesia tentu menjadi satu warna yang membuat Indonesia makin indah. Keberagaman beragama tersebut selain menimbulkan efek keindahan juga menyebabkan rawan konflik.

Berdasarkan data yang dilansir oleh Setara Institute (Januardy, 2014)³ dinyatakan bahwa terdapat 216 kasus serangan terhadap kelompok minoritas agama pada tahun 2010. Pada tahun 2011 kasus kekerasan berbasis agama merangkak menjadi 244. Pada tahun 2012 kasus kekerasan berbasis agama makin meningkat menjadi 264 kasus. Berdasarkan data yang dilansir Setara Institute tersebut dapat dilihat bahwa tiap tahun jumlah kekerasan atas nama agama terus merangkak naik. Hal ini tentu menjadi satu prahara yang sangat mengkhawatirkan bagi keberlangsungan hidup berbangsa dan bernegara di negeri Pancasila ini. Terdapat beberapa faktor yang menye-

³Januardy, Aldo Felix. 2014. 'Hati dan Kekerasan Atas Nama Agama'. <http://idlib.com/2014/08/08/hati-dan-kekerasan-atas-nama-agama/>. [Diakses 23 Jan 2014]

politik, khususnya di pra dan pemilu tahun 1999, tahun 2004, dan 2009 yang menunjukkan Kemiskinan Yang Maha Besar.

Pertama adalah faktor politik. Faktor politik selalu merupakan sebab itu kehidupan masyarakat berbangsa dan beradanya. Politik sering kali mengabdikan segala macam cara dalam mencapai tujuannya. Media yang dipergunakan pun sangat bermacam-macam. Salah satu media yang seringkali dipergunakan oleh politik untuk mencapai tujuan adalah agama. Agama merupakan media yang sangat efektif untuk dimanfaatkan oleh para politikus. Hal ini dikarenakan agama merupakan sumber identitas budaya yang sangat kuat. Dalam kontes politik, agama selalu digunakan untuk melakukan pencitraan. Dengan pencitraan atas nama agama itu tentu akan membuat publik menjadi bersimpati. Persentase kepopuleran politikus tersebut akan naik dengan drastis. Oleh sebab itu, apabila para pemimpin politik menggunakan agama, berdasarkan agama yang mayoritas, untuk mengkonstruksi sebuah identitas nasional maka pintu kekerasan akan terbuka lebar. Agama bisa digunakan secara politis untuk mencapai tujuan pribadi atau kelompok yang berkaitan dengan kekuasaan, ekonomi, atau masalah material lainnya. Dalam politik, selain pencitraan, agama juga sering kali dipergunakan untuk pembunuhan karakter. Dengan membuat aksi yang anarkhis atas nama agama tentu membuat publik akan menilai negatif pada agama yang bersangkutan.

Faktor kedua adalah faktor kapitalisme global. Kapitalisme global membuat tatanan kehidupan rakyat Indonesia menjadi tercabik-cabik. Rakyat Indonesia yang kental dengan

mulai digantikan budaya yang dari *ngga selma* itu... dan ma-
dari akar budayanya menjadi sosok yang individualis dan ma-
terialis. Hal ini merupakan satu upaya yang selalu dilakukan
oleh kapitalisme global. Kearifan lokal tersebut lambat-laun
diganti dengan budaya baru yang mengutamakan kapital atau
materi di atas segalanya. Pencabutan kearifan lokal dari ma-
sarakatnya merupakan strategi yang selalu diterapkan oleh
kapitalisme global. Perang budaya tersebut selalu dilakukan
melalui peran media. Media begitu gencar menyerang rakyat
Indonesia agar mau mengubah budayanya menjadi budaya
kapital.

Saat rakyat mulai kehilangan kearifan lokal yang dimiliki-
nya, seiring dengan itu, masyarakat pun mulai menggantinya
dengan budaya hedonis dan konsumtif. Melalui peran media,
rakyat mulai *dicekoki* dengan iklan dan tontonan yang jauh
dari akar budayanya. Melalui media, budaya hedonis dan kon-
sumtif ditanamkan dalam pola pikir rakyat Indonesia hingga
bisa begitu kental mengiringi kehidupan rakyat Indonesia.
Rakyat mulai terbiasa berbelanja karena keinginan, bukan lagi
karena kebutuhan.

Nilai-nilai kapitalisme global yang berwujud budaya he-
donis dan konsumtif ini membuat rakyat berjatuhan pada
pemiskinan. Pemiskinan ini membuat rakyat rawan sekali
dipicu dengan isu-isu yang tidak bertanggung jawab. Kekeras-
an berbasis agama merupakan salah satu isu yang sering di-
gunakan kapitalisme untuk menutupi isu pemiskinan ini. Hal
ini juga telah dipaparkan oleh Mahfud Sidiq, Ketua Komisi I
DPR yang mengatakan bahwa kemiskinan masyarakat Am-

bon menjadi Digital Repository Universitas Jember
Pradopo, mantan Kapolri, mengatakan bahwa akar perma-
salahan kekerasan atas nama agama adalah masih adanya pe-
miskinan yang melanda rakyat Indonesia. Pemerintah tidak
bisa menutup mata lagi terhadap kondisi rakyat yang berada
di pulau-pulau terluar dari batas wilayah Indonesia dan daerah-
daerah perbatasan, karena mereka pada dasarnya mengakui
bahwa mereka adalah warga negara Indonesia yang rela
berkorban hidup dalam segala keterbatasan ekonomi dan selalu
setia mengibarkan bendera merah putih di daerahnya.
Harusnya pemerintah tidak lagi mengutamakan pembangunan
di daerah perkotaan, dan harusnya juga tidak lagi mengu-
tamakan jaminan kesehatan, pendidikan, transportasi hanya
untuk daerah perkotaan. Masih banyak rakyat Indonesia yang
dengan setia, rela berkorban tanpa pamrih bersedia untuk
hidup di bawah garis pemiskinan sekaligus mengakui bahwa
mereka adalah warga negara Indonesia. Langsung atau tidak
langsung, faktor pemiskinan dan ketidakadilan yang dialami
oleh suatu kelompok tertentu memang berpeluang melahirkan
suatu tindakan yang mengarah kepada kekerasan atas nama
agama. Faktor kapitalisme global menjadi salah satu faktor
penyebab terjadinya degradasi nilai persatuan dengan dalih
ketuhanan. Nilai-nilai ketuhanan dipilih kapitalisme untuk
menggempur persatuan Indonesia karena dengan dalih ketu-
hanan maka akan melibatkan emosi para penganutnya yang
melewati batas suku.

Ketiga adalah faktor dogma agama. Nilai-nilai keagamaan
yang bersumber langsung dari Tuhan sejatinya adalah suatu

kebenaran yang harus dibuat oleh setiap orang yang beragama. Nilai keagamaan ini juga dijadikan batas dan pengingat saat manusia melakukan tindakan agar tidak melenceng dari norma dan nilai kebenaran. Namun, fakta yang seringkali didapatkan oleh media di negeri ini adalah begitu banyak kerusakan moral yang terjadi di masyarakat Indonesia saat ini. Bahkan lunturnya nilai-nilai dari sila pertama ini sudah sampai kepada urusan pemerintahan dan ketatanegaraan. Perilaku KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme) telah mendarah daging dan menjadi sesuatu yang lumrah bagi para pejabat negeri dan penguasa politik, mulai di tingkat desa hingga pusat. Hal ini tentu tidak akan terjadi apabila para pelaku KKN tersebut memiliki kesadaran yang berlandaskan nilai-nilai religiusitas yang terkandung dalam sila Ketuhanan Yang Maha Esa. Maraknya degradasi moral yang diakibatkan oleh kapitalisme global tersebut membuat banyak orang mulai menjadikan agama sebagai wadah untuk memperbaikinya.

Harapan itu ternyata tidak selamanya berakhir indah. Agama yang menjadi candu justru sering kali membuat penganutnya menjadi *taklid* (taat secara membabi buta). *Taklid* yang pada akhirnya sering kali membuat para penganutnya tidak lagi menggunakan akal sehat saat menerima fatwa dari ulama yang dianutnya. Saat para penganut tidak lagi menggunakan akal sehat maka yang terjadi adalah terbukanya peluang terjadi konflik dan kekerasan. Saat terjadi perbedaan fatwa maka yang sering kali sulit dibendung adalah reaksi dari para penganut suatu agama yang notabene meliputi kaum berpendidikan menengah ke bawah sampai dengan kaum yang

...menengah ke atas. Semakin banyak jumlah ...
 ...pula mereka diprovokasi untuk melakukan segala ...
 ...mengatasnamakan agama. Saat kekerasan ...
 ...mengatasnamakan agama maka segala hal akan dianggap ...
 ...harus mereka utamakan tanpa memedulikan ...
 ...persatuan yang ada. Dogma agama inilah yang sering ...
 ...dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk melakukan ...
 ...legumasi

Kita bisa melihat bagaimana fenomena naiknya Jokowi yang menggandeng Ahok menuju Gubernur DKI Jakarta pada tahun 2013; selain itu juga bisa dilihat bagaimana berbagai macam upaya yang mengatasnamakan agama untuk menjegal Basuki Tjahaja Purnama menjelang Pilgub DKI Jakarta 2017; bagaimana isu aliran Sunni dan Syiah yang ada di Puger Jember maupun di Sampang, dan masih banyak kasus kekerasan baik fisik maupun nonfisik yang ujung-ujungnya mengatasnamakan agama dan justeru memecah belah persatuan bangsa ini. Sesama etnis Madura atau sesama Etnis Jawa bisa saling melakukan kekerasan fisik saat bendera agama dikibarkan. Tidak ada lagi kesatuan atas nama suku apalagi atas nama bangsa Indonesia. Hal ini menjadi satu fenomena yang cukup marak dan memprihatinkan pasca-Orde Baru.

Solusi Degradasi Nilai Persatuan Atas Nama Ketuhanan

Permasalahan degradasi nilai-nilai persatuan yang mengatas-

Solusi pertama adalah pendidikan yang mencerdaskan telah diketahui bahwa pendidikan merupakan satu pintu utama untuk melakukan perubahan. Pendidikan yang mencerahkan menjadi satu kata kunci untuk menghentikan segala bentuk kekerasan dan konflik atas nama agama yang bisa mengancam kesatuan NKRI. Pendidikan bukan hanya mencetak sarjana dengan ijazah *cumlaude* tapi bagaimana mencetak sarjana yang sadar akan keberlangsungan negeri zamrud khatulistiwa ini. Inilah salah satu target dari pendidikan yang mencerahkan. Keberlangsungan negeri ini salah satunya ditentukan oleh persatuan seluruh rakyat Indonesia. Saat ini pendidikan di Indonesia telah banyak mengalami *dishorientasi* yang akibatnya cukup fatal bagi perkembangan pola pikir dan pola perilaku siswa didik. Melalui media, hal ini dapat dilihat bagaimana siswa-siswa melakukan tindak kriminal yang tidak bisa diterima oleh akal.

Solusi kedua adalah Peran Tokoh Agama. Tokoh agama memiliki peran yang cukup penting dalam mengiringi perjalanan bangsa ini. Di Indonesia, tokoh agama merupakan guru spiritual masyarakat. Hal ini menunjukkan pentingnya salah satu unsur dari budaya yaitu sistem religi. Tokoh agama merupakan salah satu tokoh sentral yang masih diperhitungkan kekuatannya. Hal ini dapat dilihat upaya pelibatan tokoh-tokoh agama dalam setiap momentum politik. Dengan melibatkan

... dan ... publik akan ...
... adalah peran media melalui pendidikan melekat
Media yang sering disebut *Si Kontak Ajaib* memang
peran yang luar biasa dalam menghipnotis penikmat
Hal ini nampak dari perubahan budaya yang berkem-
Masyarakat yang berbudaya komunal
menjadi budaya individualis. Hal
dari pengaruh kapitalisme global yang
sehingga berbudaya
menjadi satu solusi yang
Media tidak hanya
pada publik tapi juga
Tang-
pada publik. Tang-
adalah dengan menyu-
bertanggung jawab dan mencerdaskan,
menghibur dan menghipnotis semata. Saat ton-
yang disajikan oleh
media melakukan pembodohan pada
publik.

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa kondisi persatuan Indonesia saat ini cukup memprihatikan. Nilai-nilai ketuhanan yang terkandung pada sila pertama Pancasila mulai dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak ber-

menyumbang banyak untuk memecah belah persatuan NKRI. Hal ini dapat dilihat dengan semakin meningkatnya angka ketertasan dan konflik yang mengatasnamakan agama. Faktor-faktor penyebab degradasi persatuan Indonesia yang mengatasnamakan agama adalah faktor politik, kapitalisme global, dan dogma agama. Degradasi tersebut tentunya bisa diatasi dengan berbagai macam cara seperti pendidikan yang mencerahkan, peran tokoh agama, dan peran media melalui pendidikan melek media. ●●●

Daftar Pustaka

- Koentjaraningrat. *Pengantar Ilmu Antropologi*, Jakarta, Aksara Baru, 1979.
- Koentjaraningrat. *Pengantar Ilmu Antropologi*, Jakarta, Radar Jaya Offset, 2000.
- Januardy, Alldo Fellix. 2014. 'Ham dan Kekerasan Atas Nama Agama'. <https://alldofj.com/2014/08/08/ham-dan-kekerasan-atas-nama-agama/>. [Diakses 23 Juni 2014]